

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu dari tujuan besar dari pembangunan ekonomi secara makro ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ditambahkan dengan dua tujuan besar lainnya yaitu pemerataan dan stabilitas ekonomi. Pembahasan mengenai indikator pertumbuhan sangat penting dilakukan untuk menyelesaikan analisis terhadap pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Hal tersebut akan menjelaskan situasi dengan baik mengenai kondisi perekonomian makro serta kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan terjadi suatu perubahan dalam perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang diperoleh pada masa sebelumnya. Menurut (Sukirno S. , 1996), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Kuznets (Jhingan, 2001) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator

keberhasilan pembangunan. Dengan demikian semakin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu dari indikator melihat kinerja perekonomian disuatu tempat, baik pada skala nasional maupun pada skala yang lebih kecil yakni regional (daerah). Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dengan kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) sendiri adalah nilai dari total seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu kegiatan perekonomian, baik yang dilakukan oleh warga lokal (WNI) maupun warga asing (WNA) yang bermukim atau menetap di negara bersangkutan. Sehingga, ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB untuk skala nasional atau persentase perubahan PDRB untuk skala Provinsi atau Kabupaten/Kota. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. PDB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomimasyarakat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB berdasarkan harga konstan (PDB Rill) Sehingga angka pertumbuhan

yang dihasilkan merupakan pertumbuhan riil yang terjadi karena adanya penambahan produksi (Mankiw, 2007)

Dalam pembahasan yang lain pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1985). Kata “perkapita” memberikan pengertian bahwa ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output total-nya (GDP) dan sisi jumlah penduduk. Proses dalam kenaikan output perkapita harus dianalisa dengan menggunakan proses melihat apa yang telah terjadi dengan output total disatu pihak, dan jumlah penduduk dipihak lain. Sehingga kondisi yang didapat dari hasil observasi kondisi tersebut dapat menjelaskan apa yang terjadi dengan GDP total dan apa yang terjadi pada jumlah penduduk. Oleh sebab itu, posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi sendiri selalu terkait dengan jumlah penduduk.

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah baik dalam lingkup provinsi maupun kabupaten dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan memberikan suatu gambaran kondisi bagaimana tingkat kemampuan daerah dalam mengelola, memanfaatkan serta memaksimalkan sumber daya yang ada pada daerah terkait. Adanya pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun hal itu juga dapat menjadi faktor penghalang bagi pertumbuhan ekonomi. Keadaan pada negara-negara maju pertumbuhan penduduk mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena didukung oleh beberapa faktor

diantaranya adalah investasi yang tinggi, teknologi yang tinggi dan lain-lain. Namun berbeda kondisinya pada negara-negara berkembang, ada hubungan yang berbeda antara pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan tidaklah seperti yang terjadi pada kondisi negara maju, karena kondisi yang berlaku sama sekali berbeda dengan kondisi ekonomi negara maju. Ekonomi pada negara berkembang memiliki kendala-kendala yang sifatnya klasik diantaranya kurangnya modal, penguasaan teknologi yang masih sederhana, minimnya tenaga kerja yang ahli pada bidang-bidangnya dan lain-lain. karena itu, yang terjadi pada negara berkembang berbeda dengan negara maju yakni pertumbuhan penduduk benar-benar dianggap sebagai kendala atau hambatan pembangunan ekonomi, dimana pertumbuhan penduduk yang cepat memperberat tekanan pada lahan dan menyebabkan pengangguran dan akan mendorong meningkatnya beban ketergantungan. Penyediaan fasilitas pendidikan dan sosial secara memadai semakin sulit terpenuhi (Todaro, 2006)

Maka jelaslah bahwa kegiatan pembangunan nasional tidak dapat lepas dari peran-peran dari tiap-tiap daerah dalam mensukseskan pemerintahan daerah didaerah-daerahnya dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada pada masing-masing daerah tersebut. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan nasional, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasionalnya terutama dalam era otonomi luas sekarang ini.

Pada hakekatnya pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan pada tiga pondasi dalam pembangunan yakni

pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Ketiganya memiliki peran yang sangat penting didalam proses pembangunan. Sebagai salah satu dari bagian pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga berperan penting terhadap sukses tidaknya atau keberhasilan pembangunan ekonomi tingkat nasional secara keseluruhan. Masing-masing kabupaten di Indonesia termasuk juga Kabupaten Kulonprogo harus mampu menghadapi tantangan perekonomian global yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi terutama dalam era kini dimana masing-masing daerah diberikan hak kebebasan seluas-luasnya untuk mengelola kekayaan daerah yang dimiliki dan memanfaatkannya dengan optimal untuk kegiatan pembangunan di daerah tersebut yang sudah dilegalkan dalam bentuk undang-undang yang jelas mengenai otonomi daerah, sehingga menjadi mutlak tiap-tiap daerah untuk mampu bersaing antar daerah dengan semangat yang sama yakni membangun Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulonprogo diukur oleh data PDRB harga konstan yang menjelaskan suatu daerah untuk menaikkan atau menciptakan nilai tambah (*output*) pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah pada skala daerah terebagi menjadi dua jenis yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Secara umum, pengeluaran rutin ataupun pengeluaran pembangunan mengalami kondisi yang terus bertambah dari tahun ke tahun anggaran daerah tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa setiap tahun kebutuhan untuk pembangunan sangatlah besar. Pembahasan mengenai

pengeluaran pemerintah ini cukup menarik para peneliti disebabkan banyaknya teori-teori yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasannya.

Tabel 1.1.
Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Kabupaten di D.I. Yogyakarta

Kabupaten /Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)			
	2012	2013	2014	2015
Kulonprogo	4,37	4,87	4,55	4.64
Bantul	5.34	5.57	5.15	5.00
Gunungkidul	4.84	4.97	4.54	4.81
Sleman	5.79	5.89	5.41	5.31
Kota Yogyakarta	5.40	5.47	5.30	5.16

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY

Jika melihat data yang dipublikasikan oleh badan pusat statistik DIY diatas, maka dapat dicermati bahwa Kabupaten Kulonprogo adalah daerah dimana laju pertumbuhan ekonominya paling rendah se-DIY contoh pada tahun 2015 yakni 4,64% berbeda dengan 4 kabupaten yang lain seperti Sleman laju pertumbuhannya diangka 5,1%, Bantul diangka 5%, Gunungkidul diangka 4,81%, dan kota Yogyakarta diangka 5,16%. Angka 4,64% ini tentu menjadi perhatian karena jika dilihat dari kondisi geografis Kulonprogo merupakan daerah yang baik untuk perkembangan ekonomi terutama sektor pertanian. Inilah salah satu sebab mengapa peneliti ingin menjadikan Kulonprogo sebagai obyek penelitian ini.

Maka dari uraian-uraian yang telah dijabarkan diatas maka penulis merasa penting dan tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam penelitian dengan judul

“Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kabupaten Kulonprogo Tahun 1987-2017)”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan kepada Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulonprogo dari tahun 1987 - 2016. Adapun dalam penelitian ini Variable-variabel ekonomi yang dianggap berpengaruh yaitu jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan tingkat pendidikan. Ruang lingkup pembahasan terbatas seperti pada judul penelitian diatas yang mengambil obyek hanya pada fenomena-fenomena di Kabupaten Kulonprogo, dengan mengambil data dari tahun 1987 – 2016 sebagai data analisis yang digunakan.

C. Rumusan Masalah

Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan beban sehingga akan menghambat pembangunan ekonomi, namun jumlah penduduk yang tinggi juga dapat menjadi faktor penting ataupun sebagai potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik dilihat dari tenaga kerja dan konsumen, atau sasaran pasar. Jika laju demografi kependudukan tidak terkontrol dengan baik dikawatirkan akan berdampak signifikan terhadap produksi daerah yang dilihat dari PDRB harga konstan, yang merupakan salah satu tolak ukur melihat pertumbuhan ekonomi di daerah karena melihat produktifitas seluruh masyarakat yang diakumulasikan dari semua sektor ekonomi. Salah satu penyebab prospek pembangunan semakin jauh adalah karena adanya pertumbuhan penduduk yang semakin cepat,

terkonsentrasinya penduduk. Berdasarkan pada uraian diatas maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulonprogo?
2. Bagaimana pengaruh variabel pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulonprogo?
3. Bagaimana kaitan dan pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulonprogo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas maka dapat dijelaskan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisa pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulonprogo.
2. Untuk menganalisa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulonprogo.
3. Untuk menganalisa pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulonprogo.

E. Manfaat Penelitian

Disusunnya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan banyak kebermanfaatan bagi;

1. Sebagai sumbangsih acuan pemikiran dan juga sumbangsih informasi kepada para pembuat kebijakan sebagai bahan dalam mengambil kebijakan, khususnya kepada

institusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo (DPRD)

2. Sebagai acuan atau bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian senada.
3. Sebagai sarana meluaskan cakrawala informasi dan khasanah penelitian bagi para peneliti berikutnya.